

ABSTRACT

So it very well may be gathered that the land enlistment action interestingly brought about a declaration of confirmation of rights as an authentication of land allocates as of now have rights and a testament of proprietorship rights to condo units. Revelation is a validation of proof of rights as implied in Article 19 Paragraph (2) letter c of the UUPA for land rights, the chiefs rights, waqf rights, property rights over space units and security rights, all of which has been recorded in the land book concerned. ATR/BPN 1/2021 specifies that the execution of land enrollment which incorporates land enlistment interestingly and upkeep of land enlistment information should be possible electronically which will later be for this situation, the execution of land enrollment like estimating, planning, and clearing is as yet dependent on Article 19 section 2 of the UUPA, just the authoritative land enrollment testament delivered alludes to Permen ATR/BPN Number 1 of 2021 so this electronic land authentication doesn't cancel or supplant the capacity of customary land endorsement (paper) which can likewise be a legitimate lawful proof of land proprietorship in the legal interaction. Both electronic and traditional testaments have a similar situation under the watchful eye of the law or can turn out to be lawfully substantial proof dependent on Article 5 passage 2 of the ITE Law.

Keywords: *author;law;Legal Review, PERMEN ATR/BPN 2021, UUPA*

ABSTRAK

Sangat baik dapat dianggap bahwa gerakan pendaftaran tanah secara menarik membawa otentikasi hak sebagai bukti untuk paket tanah yang saat ini ada hak dan deklarasi hak kepemilikan atas unit tingkat. Pengesahan adalah pembuktian penegasan hak sebagaimana dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengurus, hak wakaf, hak kepunyaan atas unit rumah susun serta hak jaminan yang seluruhnya sudah dicatat dalam lembaran surat tanah yang bersangkutan. ATR/BPN 1/2021 menetapkan sesuatu yang terkait dengan pendaftaran tanah yang memasukkan pendaftaran tanah secara menarik dan dukungan informasi yang berkaitan dengan elektronik dalam hal pendaftaran tanah yang nantinya akan dikonsolidasikan ke dalam kerangka atau penanda. Keajaiban perhatian publik sehubungan dengan dukungan elektronik pasti terasa di internet. Padahal, untuk menjaga pengamanan surat wasiat elektronik ini, Menteri ATR/BPN menggunakan norma pengamanan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tidak hanya BSSN, Menteri ATR/BPN juga berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kemkominfo). Untuk keadaan ini, pelaksanaan pendaftaran tanah seperti perkiraan, perencanaan, dan pembukaan lahan masih tergantung pada Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, hanya pengesahan pendaftaran tanah manajerial yang dibuat mengacu pada Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021. Jadi pernyataan tanah elektronik ini tidak mencabut atau menggantikan fungsi surat wasiat tanah adat (kertas) yang juga bisa menjadi bukti sah yang substansial atas kepunyaan tanah dalam interaksi hukum. Deklarasi elektronik dan reguler memiliki situasi yang serupa di bawah pengawasan hukum atau dapat berubah menjadi bukti substansial yang sesuai dengan hukum bergantung pada Pasal 5 ayat 2 UU ITE

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Permen ATR/BPN Tahun 2021, UUPA